



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA**

**RANCANGAN AWAL  
RENCANA KERJA(RENJA) PENYELARASAN  
KECAMATAN PURWANEGARA  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN PURWANEGARA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2024**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang

diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2009 tentang RPJP. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## 1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor

- 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
  26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
  27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;

- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

##### **BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

##### **BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

**BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

**BAB 5 : PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan Penunjang Fungsi Kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 3 program, 6 kegiatan, dan 11 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.874.041.278,- dengan fokus utama pada bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Purwanegara selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal, bersih serta

akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang ada di Kecamatan, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan tepat waktu tanpa didasari paksaan serta penyelewengan yang dilakukan oleh petugas pungut pajak.
3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas (belum semua pelaksana dan pejabat struktural terpenuhi fasilitas laptop dan printer)

Dari 3 program, 6 kegiatan, dan 12 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 3 program, 7 kegiatan, dan 11 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.874.041.278,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 7 kegiatan, dan 12 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.909.680.278,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi bahan

logistik kantor, belanja modal, pemeliharaan kendaraan roda 4, dan PBB.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

**a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan (Fasilitasi laptop untuk pelaksana administrasi dan Pejabat struktural belum merata/masih kurang).
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.
3. Kurangnya ketertiban administrasi di kecamatan yang menyebabkan adanya dokumen/STNK yang hilang sehingga tidak bisa dibayarkan pajak kendaraan dinas tersebut.
4. Adanya ASN yang pensiun sehingga anggaran gaji dan tunjangan ASN tidak semuanya terserap.

**b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistic kantor, pengadaan sarana dan prasara pendukung Gedung kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan dan monoring yang baik.
2. Komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing – masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.
3. Menyelaraskan apa yang akan dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan.
4. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
5. Menyelaraskan hal – hal yang akan dikerjakan sesuai dengan target kinerja.
6. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

7. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada tahun 2022 perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor – aktor penyebab tersebut, diantaranya : Semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2022 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi masih banyak yang harus diperhatikan dan di tingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan harapan kita, indikator kinerjanya. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
2. Menemukan dan mengenali kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian di tindak lanjuti dengan upaya – upaya perbaikan.
3. Mendapatkan informasi kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  
s.d. Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7 +9	(11)=10/ 4
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SKM	84	81,20	82,00	82,40	100	84,00	247,6	61,9
		Nilai SAKIP	CC	C	CC	C	C	B	CC	CC

		Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak	100%	100 %	100 %	100	100	100%	100%	100%
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase keselarasan dokumen perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>						
	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan	14 ASN	14 ASN	14 ASN	11 ASN		14 ASN	14 ASN	14 ASN
	Pelaksanaan	Jumlah	8 orang		6 orang	6 orang		6 orang	6 orang	6 orang





	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang terbayarkan	4 orang	3 orang	3 orang	4 orang	4 orang	4 orang	3 orang	3 orang
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>						
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9 unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit		9 Unit	9 Unit	9 Unit
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		2 unit	2 unit	2 unit
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan	Jumlah sarana dan	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit		13 unit	13 unit	13 unit





	<b>DESA</b>									
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>						
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100 %	13 desa		
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam penyusunan administrasi Tata	13 desa	3 desa	10 desa	10 desa	100 %	13 desa		

		Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	100 %	4 desa		
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam fangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100 %	2 dok		
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 dok	1 dok	1dok	1dok	100 %	1 dok		

	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 dok	1dok	1dok	1dok	100 %	1dok		
	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyusunan program pelaksanaan PMD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok		
	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100%	2 lap		

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut, 2 berstatus tercapai yaitu nilai IKM dan SAKIP walaupun pada prakteknya masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Mewujudkan transparansi instansi pemerintah.
2. Diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja serta pendisiplinan jam kerja sehingga bisa menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan wilayah kerja sesuai tugas, pokok dan fungsi masing – masing Aparatur Sipil Negara.
3. Dengan telah diberlakukannya uji coba e presensi bagi semua ASN akan meningkatkan kedisiplinan jam kerja ASN dan diharapkan akan menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas.
4. Diperlukannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya di wilayah Kecamatan Purwanegara, dalam hal ini meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Diadakannya pembinaan dan pendampingan administrasi ke desa – desa yang dilakukan oleh Tim Kecamatan sesuai jadwal yang dtentukan, minimalnya 2 kali dalam 1 tahun.
2. Himbauan dari atasan kepada ASN yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya berdasarkan tupoksinya dan meminimalisir indiscipliner.
3. Melakukan himbauan di setiap kegiatan, rapat, upacara untuk mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap rencana kerja Kecamatan seperti pelunasan PBB secara tepat waktu tanpa

adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak dan mempedomani 12 etika budaya malu aparatur pemerintah desa sehingga aparatur pemerintah desa akan lebih loyal dalam bekerja sesuai tupoksinya dan tertib administrasi pemerintahan desa dan meningkatkan kedisiplinan jam kerja.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikutini:



Lampiran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		Adanya ASN yang pensiun sehingga anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak terserap 100%	Memohon kebijakan kepada BKD untuk menambah ASN sesuai tupoksi	
				2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		Kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan meminimalisir penyelewengan dalam penyetoran uang pajak ke bank.	Monitoring dan evaluasi ke desa desa dengan menggalakkan program seperti pring pethuk nabung Bersama selama 1 tahun untuk membayar pajak dengan tepat waktu.	
				3. Program pembinaan dan	100%		Administrasi	Monitoring dan	

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>URAIAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN</b>	<b>TINJUT REKOMENDASI DPRD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
				<p>pengawasan pemerintahan desa</p> <p>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah</p>	100%		<p>pemerintahan di desa yang kurang tertib serta penginventarisiran asset desa yang perlu diadakan pembenahan dan sosialisasi pentingnya asset desa.</p> <p>Memecahkan Bersama isu strategis atau permasalahan yang terjadi di kecamatan serta mencari solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak.</p>	<p>evaluasi dana desa se kecamatan yang dilakukan secara berkala minimal 1 tahun 2 kali monev.</p> <p>Adanya sosialisasi yang dilakukan secara rutin seperti sosialisasi tentang PBB dan 12 budaya malu bagi aparat desa.</p>	

#### 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 4 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Kurangnya etos kerja dan kesadaran dari diri sendiri tentang kedisiplinan jam kerja serta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah.( Semoga aka nada perubahan kedisiplinan dengan adanya e-presensi dan e- kinerja).
2. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan sehingga menghambat pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan. (Belum meratanya fasilitas lapotop untuk pelaksana dan pejabat struktural yang ada di Kecamatan Purwanegara sehingga menghambat penyetoran yang sesuai dengan deadline yang ditentukan)
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu serta adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkannya ke bank, apatisme dalam mengikuti musrenbang yang dilaksanakan baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Sumber Daya Manusia yang ada tidak semua memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi tidak relevan dengan uraian tugas dan menghambat tercapainya indikator kerja.

2. Beberapa sarana dan prasarana kelembagaan tidak dapat digunakan karena rusak ataupun karena belum memadai, dan banyak pelaksana serta pejabat struktural yang belum mendapatkan fasilitas laptop sehingga menghambat ketepatan penyeteroran data maupun laporan.
3. Kurangnya keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelayanan terhadap masyarakat serta kurang disiplinnya dalam penerapan jam kerja sehingga pelayanan langsung terhadap masyarakat secara umum belum optimal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan mendisiplinkan jam kerja ASN dengan aplikasi e-presensi dan e-kinerja sehingga pelayanan langsung terhadap masyarakat umum akan lebih optimal.
2. Menambah sarana dan prasarana yang memadai untuk fasilitasi pelaksana dan pejabat struktural yang ada di Kecamatan Purwanegara sehingga ketepatan penyeteroran data dan laporan akan lebih terwujud.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan tertib administrasi desa dengan cara pengawasan dan pendampingan langsung ke desa - desa di seluruh wilayah Kecamatan Purwanegara oleh tim kecamatan dengan anggaran yang sesuai kebutuhan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat serta meningkatkan pelayanan prima tentunya dengan ramah dan sopan.
5. Tersedianya anggaran yang cukup di tahun berjalan tanpa adanya refocusing ataupun rasionalisasi sehingga semua program kegiatan yang sudah di targetkan akan tercapai 100%.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil

analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas, belum meratanya fasilitas laptop bagi pelaksana dan pejabat struktural, printer, LCD, lemari file, AC, CCTV.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu serta tidak adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkan pembayaran pajak dari masyarakat ke bank.
3. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di Kecamatan Purwanegara sehingga pengoptimalan tugas dan fungsi aparatur pemerintah kurang bisa tercapai sehingga menyebabkan kelambanan birokrasi.
4. Kurangnya pagu anggaran di tahun berjalan sehingga tidak semua program kegiatan bisa dilaksanakan secara 100% dan target yang ditentukan juga tidak tercapai 100%.

### 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, anggaran belanja yang dialokasikan untuk Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara diusulkan sebesar

Rp 2.474.000.000,- yang terbagi dalam 5 program 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Hanya saja sudah direfocusing 2 kali menjadi Rp. 1.852.328.239 Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan mulai Tahun 2024. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program kegiatan dan sub kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4  
Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Progr am/ Kegia tan/ Sub Kegia tan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR KEWILAY AHAN				2.474.000. 000						
	Program Pembinaa n Dan Pengawas an Pemerinta han Desa	Kecam atan Purwa negara	Prosent a Tertib Administ rasi Pemerint ahan Desa	100%	183.275.40 0		Kec. Purw aneg ara	Prosent a Tertib Administ rasi Pemerint ahan Desa	100%	183.275 .000	
	Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Kecam atan Purwa negara	Prosent a Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan Umum	100%	19.999.800		Kec. Purw aneg ara	Prosent a Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan Umum	100%	20.000. 000	

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Purwanegara	Prosentase Ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2.116.975.000		Kec. Purwanegara	Prosentase Ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2.116.975.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Purwanegara	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai ketentuan	100%	153.749.800		Kec. Purwanegara	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai ketentuan	100%	153.750.000	

2.4 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Banjarnegara  
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Purwanegara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Purwanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Hasil RKPD SIPD							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Pro gram	Kelua ran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Kecamat an Purwan egara		4 dok		7.125.500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	7.125.500
7	1	06	2.01	09	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah an Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah Desa tertib administrasi pemerintahan desa yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamat an Purwan egara		4 dok		9.999.900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	9.999.900

7	1	06	201		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Prosentase pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Purwanegara		4 desa		100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.000.000
7	01	06	201	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa		Kec. Purwanegara		2 dok		5.750.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.750.000
7	01	06	201	11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Kec. purwanegara		1 dok		5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.000.000
7	1	06	2.01	11	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwanegara		1 dok		10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.000.000



7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kec Purwane gara	100 %	8doku men	1 Tahun	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersunnya dokumen perencanaan	100%	3.000.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Purwane gara	100 %	14 dokumen	1 tahun	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3.000.000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gaji ASN yang terbayar	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		11 ASN	1 tahun	1.551.701.370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1.551.701.370
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan penatausahaan keuangan yang terbayarkan	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		50 dok		43.262.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	43.262.800

7	1	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan bulanan/tribulanan/semesteran yang tersusun	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Purwonegara		8 dok		3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3.000.000		
7	1	1	2.06		<b>Administrasi umum Perangkat Daerah</b>															
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Purwonegara		1 paket		10.714.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.714.600		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Purwonegara		8 paket		88.296.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	88.296.700		
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
7	1	01	207	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwonegara		55 unit		65.509.400				55 unit	65.509.400		

7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwonegara		4 unit		40.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit(3 laptop 1 genset)	40.000.000
7	1	1	207	11	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Purwonegara		1 unit		74.999.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu			74.999.900
7	1	01	207	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Purwonegara		1 unit		24.368.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu			24.368.800
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kecamatan Purwonegara		2 lap		16.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	16.800.000

7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kecamatan Purwonegara		3 orng		107.001.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		107.001.200
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwonegara		9 unit		20.510.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	20.510.000
7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah	Kecamatan Purwonegara		2 unit		49.999.030		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	49.999.030
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwonegara		9 unit		14.821.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	14.821.200
					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>												

7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
7	1	2	2.3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang terlaksana	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Purwonegara		1 lap		19.699.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	19.699.800	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non-usaha	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan perizinan Non-usaha yang terlayani	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Purwonegara		1 dok		5.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	5.500.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nont-perizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan		Kecamatan Purwonegara		1 lap		8.550.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	8.550.000	

7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola SPPT PBB yang tersalurkan		Kecamatan Purwane gara		1 lap		120.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	120.000.000
												<b>TOTAL</b>	<b>2.474.000.000</b>					<b>2.474.000.000</b>



Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1) nihil

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Peningkatan jalan desa	Desa Purwanegara	Persentase perbaikan jalan desa rusak berat berlubang menggenang air menghambat akses perekonomian	146.000.000	Bankeu PIK 2022
2.	Peningkatan jalan rabat beton	Desa Kalipelus	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	145.000.000	Bankeu PIK 2022
3	Peningkatan jalan	Desa Purwanegara	Prosentase pelaksanaan jalan rusak berat susah dilewati	145.000.000	Bankeu PIK 2022
4.	Peningkatan jalan desa	Desa Purwanegara	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan desa yang rusak	215.000.000	Bankeu PIK 2023
5.	Pergeseran jalan/pembuatan makadam jalan	Desa Petir	Prosentase pelaksanaan pembuatan makadam di desa petir yang Sebagian masih berupa tanah dimana Ketika hujan berlumpur	150.000.000	Bankeu PIK

6.	Pemeliharaan jalan desa	Desa Mertasari	Prosentase perbaikan jalan berlubang dan tergenang air	2000m	Bankeu Khusus DPU
7	Pembangunan sarana air bersih	Desa Purwonegoro	Prosentase pemenuhan ketersediaan air bersih		Bankeu Khusus
8	Peningkatan jalan dan pelebaran jalan	Desa Merden	Prosentase ketersediaan jalan kabupaten yang sempit dan rawan kecelakaan		Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten
9	Peningkatan jalan penghubung antar desa	Desa Karangayar	Prosentase pelaksanaan akses peningkatan ekonomi terhambat		Bankeu Khusus DPU
10	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Kutawuluh	Prosentase pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	1000 x 2,5	Bankeu khusus DPU
11	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Danaraja	Prosentase pelaksanaan rehabilitasi jalan usaha tani yang akan meningkatnya biaya transportasi untuk mengangkut hasil panen		Bankeu Khusus
12	Peningkatan jembatan jalan desa	Desa Gumiwang	Prosentase pelaksanaan peningkatan jembatan jalan desa yang terlalu sempit dan bangunan sudah tua		Bankeu Khusus
13	Peningkatan jalan desa yang sudah	Desa Parakan	Terlaksananya peningkatan		Bankeu Khusus

	rusak parah		jalan desa yang rusak		
14	Peningkatan dan pemeliharaan PUSTU	Desa Pucungbedug	Terlaksananya rehabilitasi PUSTU yang sudah tua dan kondisi bangunan banyak yang rusak		Banque Khusus
15	Rehabilitasi/pembangunan Gedung pemerintah	Desa Kalitengah	Terlaksananya rehabilitasi kantor kepala desa yang terlalu sempit		Banque Khusus
16	Pembangunan Sarana Air Bersih	Desa Kaliajir	Tecukupinya ketersediaan air bersih khususnya pada musim kemarau		Banque Khusus

## 2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Nihil

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut :
  - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kependudukan;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- 2 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
  - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
  - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
  - c. Memperkuat moderasi beragama;
  - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
- 3 Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut :
  - a. Konsolidasi Demokrasi;
  - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
  - c. Penegakannhukum nasional;
  - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
  - e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

##### a. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Peralihan tahun 2023-2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terealisasinya program secara otomatis untuk perkantoran. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program penataan administrasi kependudukan, program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Purwanegara selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat yang tentunya di dukung dengan fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai seperti pemerataan laptop untuk semua pegawai sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Purwanegara.

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Kecamatan Purwanegara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan organisasi untuk kurun waktu peralihan satu sampai 3 tahun ke depan sambil menunggu adanya kepala daerah yaitu di tahun 2024. Diformulasikannya sasaran strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya manusia aparatur serta dengan terfasilitasinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga akan tercapai target kinerja dalam 100%. Penambahan bahan logistik kantor untuk pemenuhan kebutuhan logistik kantor selama 1 tahun berjalan dan didukung sarana dan prasarana yang memadai yang akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur serta kelancaran birokrasi ataupun tata kelola pemerintahan yang baik tentunya di Kecamatan Purwanegara.



Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Banjarnegara  
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Purwanegara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Purwanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangn Tahun 2024					Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/  Pagu Indikatif (Rp.)			
						Pro gra m	Kelua ran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Kecamat an Purwane gara		4 dok		7.125.500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100%	10.000.000
7	1	06	2.01	09	Fasilitasi Administras i Tata Pemerintah an Desa	Prosentas e has il Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa	Jumlah Desa tertib administrasi pemerintahan desa yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamat an Purwane gara		4 dok		9.999.900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100%	10.000.000

7	1	06	201		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Prosentase pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Purwonegara		4 desa		100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.000.000
7	01	06	201	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa		Kec. Purwonegara		2 dok		5.750.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.000.000
7	01	06	201	11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Kec. purwonegara		1 dok		5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.000.000
7	1	06	2.01	11	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwonegara		1 dok		10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	30.400.000

7	1	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa tertib Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwonegara		3 dok		30.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	30.400.000
7	1	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pendampingan desa yang terlaksana yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwonegara		2 lap		10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	20.000.000
7	1	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>													
7	1	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>													
7	1	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pelaksanaan tugas forkompinca	Jumlah bulan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. purwonegara		1 tahun		19.999.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Porsentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Porsentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Purwonegara				0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													



7	1	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan bulanan/tribulanan/semesteran yang tersusun	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Purwonegara		8 dok		3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	4.000.000
7	1	1	2.06		<b>Administrasi umum Perangkat Daerah</b>													
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Purwonegara		1 paket		10714.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Purwonegara		8 paket		88.296.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	90.000.000
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
7	1	01	207	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwonegara		55 unit		65.509.400				55 unit	65.000.000

7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwane gara		4 unit		40.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit(3 laptop 1 genset)	40.000.000
7	1	1	207	11	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Purwane gara		1 unit		74.999.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu			
7	1	01	207	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Purwane gara		1 unit		24.368.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu			
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		2 lap		16.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	17.000.000

7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kecamatan Purwonegara		3 orng		107.001.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		105.504.000
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwonegara		9 unit		20.510.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	20.515.200
7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah	Kecamatan Purwonegara		2 unit		49.999.030		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	50.000.000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwonegara		9 unit		14.821.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	15.000.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																	

7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
7	1	2	2.3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang terlaksana	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Purwonegara		1 lap		19.669.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	19.700.000	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non-usaha	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan perizinan Non-usaha yang terlayani	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Purwonegara		1 dok		5.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	5.500.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nont-perizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan		Kecamatan Purwonegara		1 lap		8.550.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	8.580.000	

7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola SPPT PBB yang tersalurkan		Kecamatan Purwane gara		1 lap		120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	120.500.000
7	1	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>												
7	1	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>												
7	1	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pelaksanaan tugas forkompinca	Jumlah bulan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. purwane gara		1 tahun		19.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	20.000.000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Porsentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Porsentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Purwane gara				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
											<b>TOTAL</b>	<b>2.474.000.000</b>					



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Kecamatan Purwanegara adalah Rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan pada :
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - e. Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
  - a. koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan 1 sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa dengan 6 sub kegiatan yaitu :
  - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
  - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
  - c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
  - e. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa.
  - f. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - g. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - h. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

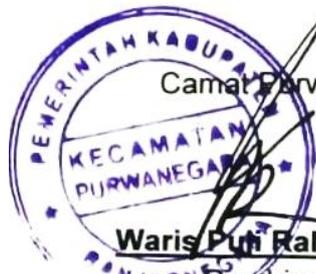
## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal : Januari 2024

  
Camat Pijirwanegara  
**Waris Puh Rahayu S.Sos.**  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19680111 198903 1 005